

STUDI STRATEGI PENINGKATAN KINERJA GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DALAM MENGELOLA JARINGAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI TINDAKI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Idran

Idran-018@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aimed at to find out the status and strategy of Water User Association Federation (WUAF) performance increasing on Irrigation Schemes Management at Tindaki Irrigation Area of Parigi Moutong Regency. The population of the research is water users that included in WUAF which consist of 165 farmers , and there is 62 respondent that choosed by using proporportional random sampling. The research type is descriptive with quantitative approach. Data collected through questionnaire, observation and documentation. Data analyzed by SWOT analysis. The result of this study indicate the status of WUAF performance is in Poor level (26%-50%), consist of Organization Aspect in Good level (50%-58,31%), Water Supply aspect in Good level (50%-75%), Maintenance aspect in Poor level (0%-25%%), Financial aspect in Poor level (43,75%-50%), Present condition of Irrigation Schemes aspect in Poor level (47,25%-50%) and Technical empowerment aspect ini Good level (52,75%-75%), 2). The strategy to increase WUAF performance is Strength – Opportunity (SO) strategy that use strength to make use of opportunity through : (i) strengthening the capacity of WUA, (ii) Legalization of WUA support into Qualified of other WUA members (farmers), (iii) WUA must be learned in the network-information system, (iv) The WUA's capacity building by Government must be in the farmer-need assesment preparation.

Keywords: *strategy, performance, SWOT*

Peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, pada dasarnya dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain ekstensifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi, namun upaya tersebut memerlukan waktu yang panjang. Dalam jangka pendek pilihan yang layak untuk meningkatkan produktivitas usaha tani adalah melalui intensifikasi dengan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dapat dilakukan salah satunya melalui alokasi air irigasi secara efektif dan efisien dan faktor penentu dan faktor penentu keberhasilan usahatani padi di lahan sawah adalah adanya fungsi jaringan yang efisien dan efektif (Saptana, dkk. 2001). Perlunya alokasi sumberdaya air (irigasi) pada lahan sawah

terkait dengan kinerja pengelolaan air irigasi pada level usahatani yang masih jauh dari optimal, bahkan cenderung masih boros, sementara itu kehilangan air yang terjadi di saluran irigasi juga sulit ditekan. Pentingnya jaringan irigasi ini ditunjukkan pula dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 tahun 2006 tentang Irigasi.

Irigasi mempunyai peranan penting terhadap pertanian. *Pertama*, menyediakan air bagi tanaman yang membantu mengatur melembabkan tanah. *Kedua*, membantu menyuburkan tanah melalui zat-zat yang dibawa air. *Ketiga*, penggunaan pupuk dan obat lebih efektif. *Keempat*, menekan pertumbuhan gulma. *Kelima*, mempermudah pengolahan tanah (Isnaini, 2006).

Diundang-undangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi sebagai pengganti PP Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam hal pengelolaan irigasi yang semula pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan air irigasi beserta bangunan pelengkap yang ada di dalam Wilayah Daerah tetap dikelola oleh pemerintah, dalam PP No. 77/2001 pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Sedangkan pengurusan dan pengaturan air dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap dalam petak tersier, irigasi desa, dan pengurusannya diserahkan kepada perkumpulan petani pemakai air atau aparat desa yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, mengamanatkan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

Salah satu temuan dari kegiatan penelitian terhadap proyek-proyek irigasi sederhana yang disebut "*Action Research Program*" (ARP) adalah, bahwa petani kurang berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan pemerintah. Kurangnya rasa tanggung jawab petani yang mengakibatkan rendahnya partisipasi petani disebabkan karena sarana fisik jaringan irigasi tersebut sering kurang sesuai dengan keinginan petani. Rekomendasi ARP menyebutkan, bahwa dalam proses pembangunan irigasi, petani perlu berpartisipasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi sampai kepada operasi dan pemeliharaannya, sehingga rasa

memiliki di kalangan petani akan tumbuh terhadap jaringan yang telah dibangun tersebut (Ambler, 1992).

Melalui kebijakan pengelolaan irigasi yang selama ini hanya ditangani pemerintah pada awalnya dapat memberikan dampak yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya swasembada pangan, khususnya beras pada tahun 1984. Namun keberhasilan tersebut tidak berkelanjutan mengingat dukungan prasarana irigasi banyak yang menurun kuantitas, kualitas maupun fungsinya, apalagi Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1987. Penurunan fungsi prasarana irigasi tersebut antara lain disebabkan bahwa selama ini anggapan pengembangan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga sebagian petani berpendapat bahwa mereka tidak turut bertanggung jawab (Direktorat Pengelolaan Air, 2008).

Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2001 pasal 4 tentang Irigasi, menjelaskan bahwa pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya (Isnaini, 2006).

Perkumpulan petani pemakai air (P3A) merupakan organisasi sosial dari petani, yang tidak bertindak dan bernaung pada golongan atau partai politik, merupakan organisasi yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam kegiatan pengelolaan air pengairan sehubungan dengan kepentingan-kepentingan melangsungkan usaha tani bersama (Kartapoetra, 1994).

Partisipasi anggota merupakan unsur-unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu P3A yang merupakan organisasi berwatak sosial yang dibentuk oleh anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Oleh karena itu P3A harus memiliki kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk

partisipasi dan memacu manfaat bersama. Diharapkan manfaat tersebut dapat mendistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan kontribusi dalam aneka kegiatan yang dilakukan (Lubis, 1999).

Pemerintah juga telah menyerahkan agar dana untuk pemeliharaan dan kelangsungan fungsi dari jaringan irigasi dibiayai oleh anggota P3A tersebut (Asnawi, 1992). Dana dari iuran ini akan dipergunakan untuk pemeliharaan irigasi. Jika suatu daerah pungutan iurannya tinggi, maka makin tinggi pula dana yang tersedia untuk pemeliharaan dan sebaliknya. Jadi diharapkan petani mempunyai kesadaran untuk membayar iuran, dimana dana untuk pemeliharaan irigasi tergantung pada iuran anggota (Kuswanto, 1993).

Sebagai representasi dari petani pada lahan beririgasi, P3A/GP3A merupakan lembaga pelaksana strategis agar pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana irigasi dapat dilaksanakan demi kepentingan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan meningkatkan pendapatan. Secara teknis, lahan beririgasi harus diatur pembagiannya sesuai dengan kebutuhan/kepentingan bersama. Oleh karena itu mutlak diperlukan adanya wadah koordinasi dan komunikasi agar semua petani mendapatkan fasilitas air irigasi secara adil dan merata. Lembaga ini juga dimaksudkan sebagai jalur transfer teknologi budidaya pertanian dan program-program pembangunan dari pemerintah. Kinerja lembaga mutlak harus dikembangkan sebagai penguatan (empowerment) bagi pihak petani pemanfaat. Pada pengembangannya lembaga GP3A dapat dikembangkan menjadi lembaga koperasi sebagai wujud kemandirian usaha tani dan partisipasi aktif dalam pengelolaan irigasi.

Pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan

keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Bentuk kelembagaan masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi antara lain berupa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A. Kegiatan penilaian peringkat GP3A dalam partisipasi OP merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat petani melalui P3A dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan partisipatif. Kegiatan penilaian peringkat tersebut sebenarnya merupakan bentuk monitoring dan evaluasi P3A dan GP3A dalam peran sertanya melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.

Sektor irigasi merupakan salah satu pendukung pertumbuhan produksi pangan khususnya padi yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagai komoditi strategis nasional, komoditas padi sawah senantiasa diupayakan agar pengusahaannya dapat dipertahankan oleh petani. Produksi padi Indonesia kurang lebih 80 persen berasal dari lahan beririgasi (Sumaryanto, 2006) maka jika terjadi degradasi kinerja dalam pengelolaan sistem irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan jaringan, fasilitas sarana dan prasarana pendukung serta kelembagaannya akan menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan nasional di masa depan.

Kemunduran kinerja pengelolaan irigasi dapat berdampak pada penurunan produktivitas, turunnya intensitas tanam, dan meningkatnya resiko usaha tani. Secara tidak langsung dapat menyebabkan lemahnya komitmen petani untuk mempertahankan ekosistem sawah karena tidak kondusif lagi untuk pertumbuhan tanaman padi yang membutuhkan genangan air dalam jumlah dan waktu yang tepat.

Kebijakan pengelolaan irigasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air memuat tentang perlindungan sumber daya air dan pengaturan pemanfaatannya. Pada pasal 64 ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air dinyatakan

bahwa pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air. Dengan demikian keberlanjutan sistem irigasi tergantung dari pada tinggi rendahnya kinerja pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, baik tingkat jaringan primer dan sekunder maupun jaringan tersier.

Sistem irigasi yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada menurunnya fungsi jaringan dan terlantarnya berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Indikator menurunnya fungsi jaringan ditandai dengan berkurangnya kemampuan mendistribusikan debit air yang sesuai, baik untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman dari segi kualitas dan kuantitasnya maupun untuk kebutuhan aktivitas lainnya.

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu sentra produksi padi sawah di Propinsi Sulawesi Tengah. Untuk mendukung pertanian di kabupaten tersebut terdapat beberapa irigasi yang tersebar di beberapa wilayah, baik irigasi potensial maupun fungsional. Salah satu daerah irigasi tersebut adalah Daerah Irigasi (DI) Tindaki yang berlokasi di Kecamatan Torue. Dalam pengelolaan irigasi melibatkan peran serta petani yang tergabung dalam P3A pada masing-masing lokasi Daerah Irigasi tersebut.

Perbedaan lokasi antara hulu, tengah dan hilir dalam manajemen pengelolaan secara teknologi akan berbeda pula, sehingga pembagian manfaat air akan merata. Sebagaimana pendapat Rachman (1999) menjelaskan bahwa pengelolaan daerah irigasi merupakan upaya untuk mendistribusikan air secara adil dan merata. Namun, dalam mekanismenya sering diperhadapkan pada beberapa-permasalahan mendasar yaitu 1) jumlah daerah golongan air bertambah tanpa terkendali, 2) letak petakan sawah relatif dari

saluran tidak diperhitungkan dalam distribusi air dan anjuran teknologi yang berada di bagian hulu, tengah dan hilir, 3) penyadapan air secara liar, 4) pintu air yang tidak berfungsi, dan 5) produktivitas padi sangat beragam antara bagian hulu.

Adanya anggapan bahwa air irigasi adalah barang publik (*public goods*) menyebabkan masyarakat cenderung kurang efisien dalam menggunakan air. Secara ekonomi, ketidakjelasan tentang hak-hak dalam penggunaan air (*water rights*) dan kewajiban dalam pengelolaan air menyebabkan organisasi sosial pemakai air kurang efektif, dan mekanisme kelembagaan dalam alokasi sumber daya air tidak berfungsi, sehingga menimbulkan inefisiensi penggunaan air.

Kurangnya biaya operasi dan pemeliharaan sarana irigasi, sulitnya mencari pendanaan untuk membangun jaringan irigasi dan lemahnya kerjasama antara pemerintah dan petani pemanfaat air yang bertanggungjawab dalam operasi dan pemeliharaan irigasi menyebabkan pemeliharaan jaringan irigasi di bawah standar bahkan jaringan irigasi waduk, dam dan bendungan mengalami degradasi yang cukup besar sehingga saluran irigasi menjadi dangkal dan bocor. Distribusi air tidak merata dan tidak efisien karena alat ukur di pintu air yang tidak berfungsi. Tahap operasi dan pemeliharaan merupakan tahap yang cukup penting untuk ketersediaan air dan distribusi ke daerah-daerah secara keberlanjutan dan berkesinambungan.

Permasalahan yang dialami oleh GP3A Daerah Irigasi Tindaki adalah keterbatasan dalam penyediaan air irigasi diakibatkan oleh penurunan fungsi jaringan irigasi dan keterbatasan pembangunan jaringan irigasi yang baru, dan juga akibat banyaknya kerusakan pada bangunan dan jaringan irigasi yang tidak tertangani sehingga tidak dapat menyalurkan dan membagi air dengan baik sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan air per ha, disamping

itu juga kurangnya peran serta atau rasa memiliki dari masyarakat petani terhadap bangunan dan jaringan irigasi tersebut. Disamping permasalahan tersebut, juga diakibatkan oleh pola perilaku petani daerah hulu yang “menimbun” air. Perilaku petani tersebut mengakibatkan petani di daerah hilir mengalami kekurangan air sehingga pembagian air di daerah hulu dan hilir tidak merata terutama di musim kemarau.

Disisi lain keleluasan mengelola jaringan irigasi GP3A mempunyai banyak makna. Kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut seharusnya bermakna bahwa GP3A mempunyai potensi dalam mengelola jaringan irigasi, sehingga dalam merencanakan dan melaksanakan sistem irigasi dalam Daerah Irigasi, GP3A mempunyai kewenangan memutuskan keinginannya sesuai dengan air yang ada (keandalan air) dan jenis tanaman unggulan yang akan ditanam P3A, yang menurut mereka menguntungkan secara ekonomi. Sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud.

Potensi yang masih terpendam dalam organisasi GP3A, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan pengelolaan irigasi haruslah diberdayakan untuk memerankan GP3A sebagai pengelola irigasi yang otonom dan mandiri. Usaha pemberdayaan tersebut merupakan usaha bersama Pemerintah dan masyarakat yang dapat diformulasikan secara optimal berdasarkan masukan-masukan positif, salah satunya adalah usaha membuat kajian kinerja organisasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam mengelola (operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (mulai tersier, sekunder, primer hingga bangunan utama).

Jaringan irigasi harus tetap terjaga kinerjanya walaupun pengelola sebelumnya adalah Pemerintah (sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi) dan kini Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang akan melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi (sesuai Peraturan Pemerintah No. 77 tentang Irigasi).

Daerah Irigasi Tindaki dibangun pada tahun 1986. Sedangkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dibentuk pada tahun 1993, dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) baru dibentuk pada tahun 2006. Sejak dibentuk GP3A hampir setiap tahun mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas teknis terkait melalui pelatihan-pelatihan antara lain pelatihan desain partisipatif, pelatihan konstruksi PA dan pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif. Dengan adanya pemberdayaan tersebut diharapkan kinerja GP3A dapat semakin meningkat.

Namun kenyataan di lapangan, berdasarkan pengamatan selama ini P3A di Daerah Irigasi Tindaki Kabupaten Parigi Moutong yang tergabung dalam GP3A ditemukan masalah dalam menyediakan dan mendistribusikan air irigasi dengan baik, permasalahan-permasalahan yang timbul diidentifikasi sebagai berikut:

- a). Tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki P3A dalam mengelola jaringan irigasi sangat terbatas,
- b). P3A selama ini melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi di tingkat jaringan tersier dengan pola sederhana, yaitu mengatur pembagian air di tingkat kwarter,
- c). Dengan kewenangan mengelola jaringan irigasi mulai dari sumber air / bendung / pengambilan bebas sampai dengan jaringan tersier dalam satu kesatuan pengelolaan, maka P3A akan dihadapkan pada tingkat kompleksitas pengelolaan jaringan irigasi yang rumit,
- d). Telah terjadi degradasi sumber air dalam pengelolaan irigasi saat ini, yang memperngaruhi volume air yang dikelola, sehingga tingkat kesulitan pengaturan pembagian air akan semakin rumit,
- e). Pemerintah mempunyai keterbatasan keuangan dalam melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi,

sehingga kewenangan P3A meliputi juga pendanaan pengelolaan jaringan irigasi.

Permasalahan tersebut telah mempengaruhi kinerja GP3A yang pada gilirannya turut mempengaruhi produksi padi di Kecamatan Torue. Rata-rata produksi padi Kabupaten Parigi Moutong adalah 4,6 Ton/ha/tahun, sedangkan di Kecamatan Torue adalah 5,2 ton/ha/tahun dan khusus untuk daerah irigasi Tindaki adalah sebesar 3,5 ton/ha/tahun.

Untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja agar dapat secara tepat dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, sehingga air dapat disediakan dan didistribusikan sampai ke sawah, maka dibutuhkan berbagai aspek dan indikator yang mendukung.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat kinerja GP3A dalam mengelola jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Tindaki Kabupaten Parigi Moutong,
- 2) Untuk mengetahui strategi peningkatan kinerja GP3A dalam mengelola jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Tindaki Kabupaten Parigi Moutong.

METODE

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif eksploratif dengan pendekatan *expose facto*. Tipe penelitian eksploratif adalah penelitian yang berusaha menggali pengetahuan baru untuk mengetahui suatu permasalahan (Arikunto, 2010:14).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat petani yang tergabung dalam Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Daerah Irigasi Tindaki Kabupaten Parigi Moutong, maka jumlah sampel dalam studi ini adalah:

$$n = \frac{165}{1+165(0,10)^2}$$

$$n = 62$$

Jadi jumlah sampel untuk dijadikan responden sebanyak 62 (enam puluh dua) orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kinerja GP3A

Berdasarkan hasil evaluasi status tingkat kinerja GP3A dari beberapa aspek penilaian maka dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Organisasi

Aspek organisasi dengan persentase nilai 50%-58,31% (terhadap skala 100%) sangatlah terbatas. Dengan bertambahnya tugas dan tanggungjawab sesuai PP 77 / 2001, maka AD/ART P3A perlu direvisi agar organisasi dapat lebih bergairah lagi dengan wawasan pengelolaan Daerah Irigasi menjadi satu kesatuan. Pemberdayaan organisasi P3A dapat mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A dan Keputusan Dalam Negeri No. 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Organisasi GP3A mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam membantu keterbatasan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan wajib di bidang pengelolaan jaringan irigasi, terutama dalam penyediaan tenaga/personil dalam mengelola jaringan irigasi dalam satu kesatuan pengelolaan, bila dibandingkan dengan keterbatasan Pemerintah Daerah dalam menyediakan personil untuk mengelola jaringan irigasi, terutama tenaga lapangan yang telah pensiun, Pemerintah Daerah sangat sulit merekrut penggantinya, mengingat keterbatasan dana untuk menggaji personil baru. Sehingga kinerja jaringan irigasi dikhawatirkan akan menurun secara drastis.

Memberikan peran kepada organisasi GP3A sebagai pemeran utama dalam mengelola jaringan irigasi utama akan semakin mendidik (pembelajaran) dan

menjadikan organisasi lebih mandiri, mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab, sesuai dengan pengaturan kembali tupoksi Lembaga Pengelola Irigasi yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2002 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Pemanfaatan Air

Aspek pemanfaatan air dengan persentase nilai 50%-75% (terhadap skala 100%) sangatlah terbatas. Kondisi air (sumber air) yang terbatas akan menjadikan aktivitas P3A desa lebih giat dalam menjalankan roda organisasi agar air dapat sampai ke sawahnya (tingkat tersier), menuju pemakaian air yang efisien. Pemanfaatan air akan mengganggu aktivitas GP3A apabila kondisi fisik jaringan irigasi utama dan bangunan utama (pengambilan air) tidak dalam kondisi optimal.

Melalui Komisi Irigasi Kabupaten, GP3A akan lebih demokratis dalam menyalurkan aspirasi tentang jenis padi unggulan dan keandalan air irigasi yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Hak Guna Air yang ikut diserahkan kepada GP3A dalam bentuk ijin, akan memperlancar pengaturan kembali Tupoksi LPI sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2002 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga pemanfaatan air irigasi akan menuju pemakaian yang efisien dan optimal.

C. Pemeliharaan

Program kerja pemeliharaan wajib dibuat oleh GP3A secara menyeluruh dan berjenjang mulai tingkat tersier, sekunder, primer/induk sampai dengan bangunan pengambilan. Menyusun program kerja dan melaksanakan program pemeliharaan secara tertib merupakan kelemahan GP3A yang

paling menonjol selama ini (persentase nilai 25%). Dengan terbentuknya Komisi Irigasi dan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota akan membantu mengurangi kelemahan GP3A tersebut.

D. Keuangan

Mengumpulkan Iuran pengelolaan irigasi yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART merupakan kelemahan yang ditemui di GP3A (persentase < 50%), walaupun secara tertib pengurus telah mengupayakan penagihan.

Apabila Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota sudah berlaku dan berjalan secara efektif, maka sistem dan cara pengumpulan Iuran di tingkat GP3A dapat dievaluasi kembali agar lebih efektif dan bermanfaat.

E. Fisik Jaringan Irigasi

Kondisi fisik jaringan irigasi terutama tingkat jaringan utama tidak mencerminkan hasil pengelolaan oleh GP3A, karena lebih dominan hasil dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah yang diserahkan kepada GP3A.

Kondisi fisik jaringan irigasi yang buruk akan membuat GP3A sulit mengelolanya, sehingga usaha-usaha perbaikan fisik jaringan irigasi akan kembali terbentur pada kemampuan keuangan organisasi GP3A. Oleh karena itu pemberlakuan Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota, akan sangat membantu dan menumbuhkan potensi kontribusi yang dimiliki oleh anggota GP3A.

F. Pembinaan oleh Pemerintah

Pembinaan GP3A oleh instansi terkait secara periodik dan intensif menunjukkan

kemajuan dan keaktifan organisasi yang cukup baik, dan akan semakin menggairahkan GP3A dalam berorganisasi apabila stimulus dan pemenuhan kebutuhan fisik mengiringi pembinaan tersebut.

Pembinaan GP3A akan lebih efektif dan bermanfaat apabila penerapan pedoman-pedoman yang telah dikeluarkan oleh Dinas Teknis sesuai kewenangannya dijalankan secara baik dan benar serta berjalan secara terintegrasi.

Strategi Peningkatan Kinerja GP3A

a. Faktor Strategi Internal

Faktor Strategi Internal adalah faktor-faktor strategis yang juga mempengaruhi suatu kinerja yaitu kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*), disusun dan ditentukan berdasarkan data-data dan informasi yang didapatkan dari aspek-aspek tingkat kinerja kelembagaan GP3A dan tingkat kinerja O&P Daerah Irigasi.

Tabel 1 Penentuan Faktor Strategi Internal

FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT item	RATING	BOBOT item x RATING
KEKUATAN (STRENGTHS):			
1. Organisasi GP3A ber Badan Hukum	0,16	4	0,63
2. Jiwa gotong royong tinggi	0,16	4	0,63
3. Pengurus dan anggota GP3A jujur	0,15	3	0,45
4. Potensi berkontribusi	0,16	4	0,63
5. Dukungan Pemerintah Daerah	0,15	3	0,45
			2,79
KELEMAHAN (WEAKNESSES):			
1. Kemampuan SDM GP3A terbatas	0,05	2	0,10
2. Organisasi GP3A belum mandiri	0,05	2	0,10
3. Iuran kurang lancar	0,05	2	0,10
4. Pemasaran pasca panen tidak terjamin	0,05	2	0,10
5. Teknis irigasi jar utama lebih kompleks	0,04	2	0,08
			0,47
TOTAL	1,00		3,27

Sumber: Data diolah, 2015

Total bobot item x rating pada Tabel 1 yang bernilai 3,27 diperoleh dari penjumlahan bobot item x rating faktor kekuatan dan kelemahan, yang digunakan sebagai acuan titik kondisi internal pada organisasi GP3A. Hasil ini digunakan untuk melihat posisi organisasi saat ini.

b. Faktor Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal adalah faktor-faktor strategis yang mempengaruhi

suatu kinerja yaitu *peluang (Opportunity)* dan *ancaman (Threat)*, disusun dan ditentukan berdasarkan data-data dan informasi yang didapatkan dari aspek-aspek tingkat kinerja kelembagaan GP3A dan tingkat kinerja O&P jaringan irigasi. Selanjutnya hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Penentuan Faktor Strategi Eksternal

FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT item	RATING	BOBOT item x RATING
PELUANG (OPPORTUNITY):			
1. Kewenangan mengelola DI scr. utuh	0,16	4	0,63
2. Memanfaatkan Dana Pengel. Irigasi	0,16	4	0,63
3. Menanam tanaman ekonomi tinggi	0,16	4	0,63
4. Berwira-usaha (GP3A Badan Hukum)	0,15	3	0,44
5. Menerima Pembinaan Dinas Teknis	0,15	3	0,45
Jumlah			2,79
ANCAMAN (THREATS):			
1. Dana O&P semakin tinggi	0,04	2	0,08
2. Kualitas bangunan DI semakin turun	0,05	2	0,10
3. Subsidi pemerintah dikurangi	0,05	2	0,10
4. Harga produksi turun, pada panen raya	0,05	2	0,10
5. Sumber air semakin menurun	0,04	2	0,08
Jumlah			0,46
TOTAL			3,25

Sumber: Data diolah, 2015

Total bobot item x rating pada Tabel 2 yang bernilai 3,25 diperoleh dari penjumlahan bobot item x rating faktor peluang dan ancaman, yang digunakan sebagai acuan titik kondisi eksternal pada organisasi GP3A. Hasil ini digunakan untuk melihat posisi organisasi saat ini.

Menyusun Matriks Eksternal-Internal

Penilaian terhadap faktor eksternal dan internal yang dimiliki organisasi GP3A diperoleh total skor yang merupakan jumlah hasil perkalian bobot dengan rating. Organisasi GP3A Daerah Irigasi Tindaki memperoleh total skor 3,27 untuk faktor strategis internal, sedangkan pada faktor strategis eksternal menghasilkan total skor 3,25.

Tahap selanjutnya berdasarkan total skor yang diperoleh dalam tabel faktor strategis internal dan eksternal tersebut dapat dilihat posisi organisasi untuk menerapkan strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi saat ini dengan memasukkan total skor ke dalam matrik internal-eksternal sebagai berikut:

Berdasarkan Matriks Internal – Eksternal di atas diketahui posisi organisasi berada pada sel 1. Pada posisi tersebut organisasi GP3A adalah dalam kondisi membutuhkan penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan organisasi GP3A untuk meningkatkan kualitas organisasi dalam melaksanakan kewenangan mengelola daerah irigasi.

Identifikasi pada faktor internal dan eksternal menciptakan empat strategi utama, yaitu: strategi SO (*strength dan opportunities*), strategi WO (*weakness dan opportunities*), strategi ST (*strength dan treats*).

Setelah faktor Strategi Eksternal dan Faktor Strategi Internal disusun, maka dapat diketahui posisi organisasi GP3A dengan menjumlahkan skor S + O, W + O, S + T, dan W + T, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Pembobotan Hasil SWOT

	S = 2,79	W = 0,47
O = 2,79	SO = 5,58	WO = 3,26
T = 0,46	ST = 3,25	WT = 0,93

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan pembobotan tersebut, maka disusun prioritas strategi berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai yang paling rendah.

Tabel 4 Urutan Alternatif Strategi SWOT

Prioritas	Strategi	Bobot Nilai
I	<i>Strength – Opportunity (SO)</i>	5,58
II	<i>Weakness – Opportunity (WO)</i>	3,36
III	<i>Strength – Threat (ST)</i>	3,25
IV	<i>Weakness – Threat (WT)</i>	0,93

Sumber : Matriks Interaksi IFS-EFS

Hasil interaksi IFS – EFS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *Strength – Opportunity (SO)*, yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang/kesempatan yang ada. Kondisi ini menguntungkan bagi GP3A, karena dari sisi faktor internal, GP3A memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelemahannya, sedangkan dari sisi faktor eksternal, peluang yang ada jauh lebih besar daripada ancaman dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi.

5). Menyusun Formulasi Strategis

Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka disusun 4 set formulasi strategis kelembagaan GP3A dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan daerah irigasi, sebagai berikut :

1. Strategi S-O (Kekuatan – Peluang)

- Memperkuat kelembagaan GP3A yang ada untuk melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi secara utuh
- Memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anggota GP3A dalam menentukan varietas padi unggulan untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan
- Kelembagaan GP3A yang kuat akan bermanfaat untuk memperoleh setiap kesempatan peluang pembinaan dari Dinas terkait agar seluruh anggota GP3A benar-benar berdaya di semua aspek.

2. Strategi S-T (Kekuatan – Ancaman)

- Kelembagaan GP3A yang telah berbadan hukum mempunyai kesempatan meningkatkan kerjasama dengan Dinas Teknis terkait untuk memperoleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperbanyak jumlah SDM berkualitas dalam kelembagaan GP3A.
- SDM yang berkualitas yang dimiliki oleh GP3A akan meningkatkan kualitas jaringan irigasi yang dikelola oleh GP3A
- Semakin banyaknya SDM berkualitas yang dimiliki oleh GP3A serta semakin baiknya daerah irigasi, akan mempermudah GP3A melaksanakan program kerja konservasi lahan.

3. Strategi W-O (Kelemahan – Peluang)

- Kelembagaan GP3A yang telah berbadan hukum mempunyai kesempatan meningkatkan kerjasama dengan Dinas Terkait untuk memperoleh peluang pemberdayaan dari Dinas Terkait.
- GP3A harus meningkatkan perolehan kesempatan pemberdayaan pada aspek pertanian (budidaya pertanian) agar pengetahuan GP3A semakin meningkat terhadap hal-hal terbaru mengenai budidaya pertanian.
- GP3A harus memanfaatkan jejaring informasi pasar hasil produksi pertanian, agar kendala nilai jual pasca panen raya dapat disiasati.

4. Strategi W-T (Kelemahan – Ancaman)

- Pembinaan yang sifatnya rutin dari Dinas Terkait dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar kelembagaan GP3A dapat tetap eksis.
- Dengan segala keterbatasannya, GP3A dapat memanfaatkan/menanam jenis padi bibit unggul, agar nilai yang jual yang rendah pada saat panen raya tidak terlalu merugikan mereka, dengan cara mengatur sistem dan cara penjualannya.
- Peluang dan belajar menanam jenis padi unggulan yang lebih berkualitas, dapat segera diterapkan oleh GP3A, sehingga memperoleh hasil pembelajaran menanam tanaman padi berkualitas pada situasi dan kondisi yang tepat.

(47,25%-50%) dan pembinaan teknis Cukup Baik (52,75%-75%),

2. Strategi alternatif yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja GP3A adalah strategi *Strength – Opportunity (SO)*, yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif sebagai berikut: (i) memperkuat kelembagaan P3A, (ii) P3A berbadan hukum berpeluang meningkatkan kualitas SDM, (iii) P3A harus meningkatkan pengetahuannya dibidang jejaring informasi, dan (iv) memanfaatkan pembinaan Dinas Teknis dengan program-program berdaya-guna sesuai dengan usulan P3A.

Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya disarankan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tentang GP3A mengelola jaringan irigasi, utamanya pada jaringan utama daerah irigasi dengan luas areal lebih besar 500 ha,
2. Melalui Komisi Irigasi (Propinsi dan Kabupaten), Dinas teknis terkait dapat menyusun program pemberdayaan GP3A (umumnya aspek jaringan/aspek teknis irigasi, dan keuangan) secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan P3A,
3. Untuk mendukung pelaksanaan strategi peningkatan kinerja GP3A, Pemerintah Kabupaten disarankan untuk aktif menyusun dan menetapkan perangkat hukum di Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan kebijakan terbaru Pemerintah Pusat yang sesuai dengan arah dari Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Tingkat kinerja GP3A pada Daerah Irigasi Tindaki berada pada status Kurang Baik (26%-50%), meliputi aspek organisasi Cukup Baik (50%-58,31%), pemanfaatan air Cukup Baik (50%-75%), pemeliharaan jaringan Tidak Baik (0%-25%), keuangan Kurang Baik (43,75%-50%), kondisi fisik jaringan irigasi Kurang Baik

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ir. Made Antara, MP., M.Si., dan Bapak Dr. Eko Jokolelono, SE., M.Si., yang telah banyak mencurahkan perhatian, bimbingan dan arahan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ambler, J.S., 1992. *Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani*. Jakarta: LP3ES
- Asnawai, S. 1992. *Iuran Pelayanan Irigasi*. Padang: PSI-Unadad
- Isnaini. 2006. *Pertanian Organik*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Kartasapoetra, A.G. 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kuswanto. 1993. *Pengembangan Kelembagaan P3A*. Jakarta: LP3ES
- Lubis, S. 1999. *Mencari Konsep Pendekatan Partisipatif*. Jakarta: LP3ES
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia
- Salusu, J. 2000. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Saptana, 2001. Alokasi Air dalam Usaha Peningkatan Produksi Pangan dan Pendapatan Petani. *Buletin Agro Ekonomi* : Edisi 3 : 1 – 6.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryanto, 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 167-182. Bogor